

**TESIS**

**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG  
PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL  
THRESHOLD DALAM  
PEMILU PRESIDEN**



**Disusun Oleh:**

**NUZULLUDDIN FARNA**

**NIM. 2320215310045**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG  
PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL  
THRESHOLD DALAM  
PEMILU PRESIDEN**

**Tesis  
Program Magister Hukum**

**Disusun Oleh:**

**NUZULLUDDIN FARNA  
NIM. 2320215310045**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
2025**

**Judul Tesis** : **IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PEMILU PRESIDEN**


**Nama** : **Nuzulluddin Farna**

**NIM** : **2320215310045**

**Disetujui,**

**Komisi Pembimbing**

**Pembimbing**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 197506152003121001**

**Diketahui**

**Koordinator Program Magister Hukum**

**Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**

**NIP. 197202081999031004**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 197506152003121001**

**Tanggal Lulus :14 Juli 2025**

**Tanggal Wisuda :**

**Tesis ini  
Telah Diperiksa dan Disetujui  
Pada Tanggal .....**

**Pembimbing**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001**

**Disahkan oleh  
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.  
NIP. 197202081999031004**

**Diketahui Oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan

Di Depan

Sidang Panitia Penguji Tesis

Pada Tanggal, .....

**SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS**

Ketua : Dr. Suprpto. S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

## **MOTTO/ PERSEMBAHAN**

*Hidup bisa memberikan segalanya kepada siapa pun yang mau belajar dan bersedia menerima pengetahuan baru."*

**-Pramoedya Ananta Toer-**

Tiada lembar yang paling indah dalam naskah tesis ini kecuali lembar persembahan

Dengan segala kerendahan hati dan segenap rasa yukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, pemikiran sederhana ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda tercinta, terima kasih atas kasih sayang, bimbingan, dan keteladanan yang senantiasa menjadi penopang dalam setiap langkah perjuangan ini.
2. Ibunda tersayang, yang tak pernah lelah menyemangati, mendoakan, dan mendampingi dengan cinta serta ketulusan yang tiada tara.
3. Adikku tercinta, terima kasih atas semangat, perhatian, dan dukungan yang telah menjadi sumber kekuatan di sepanjang perjalanan ini.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nuzulluddin Farna

NIM : 2320215310045

Program Studi : Magister Hukum

Judul Tesis : **IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PEMILU PRESIDEN**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiarisme.
2. Pada penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2025

Yang membuat Pernyataan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '429ABAJX024979722'.

Nuzulluddin Farna

**FARNA, NUZULLUDDIN. 2025. IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PEMILU PRESIDEN. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

### **RINGKASAN**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan presidential threshold dalam UU No. 7/2017 yang mensyaratkan partai politik atau gabungan partai politik memiliki minimal 20 % kursi DPR atau 25 % suara sah nasional untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini dipandang bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak semua partai peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon, sehingga menimbulkan eksklusivitas partai besar, menghambat partai kecil, dan mengurangi pluralitas pilihan bagi pemilih. Dampak lain adalah meningkatnya fragmentasi dan polarisasi politik, serta munculnya praktik politik transaksional demi memenuhi ambang batas, yang berpotensi melemahkan semangat demokrasi inklusif.

Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menelaah UU No. 7/2017, UUD 1945, dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), terutama Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024. Analisis berfokus pada konstusionalitas presidential threshold dan peran MK dalam judicial review. Konsep ambang batas pencalonan presiden ini awalnya diterapkan untuk menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilu dan memperkuat dukungan legislatif terhadap calon presiden. Namun, penerapan aturan tersebut dinilai tidak relevan lagi seiring dengan perkembangan sistem pemilu yang serentak antara pemilu legislatif dan presiden, serta menimbulkan dampak negatif seperti eksklusivitas partai besar dan pembatasan ruang gerak partai kecil. Kebijakan ini, meskipun merupakan hasil delegasi kewenangan legislatif berdasarkan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, telah mengurangi keberagaman alternatif calon presiden yang dapat diusulkan, sehingga mengikis semangat partisipasi politik yang inklusif dan demokratis. Sementara itu, dasar konstusional penghapusan presidential threshold dikuatkan oleh kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 melalui Pasal 24, 24C, dan dukungan peraturan pendukung seperti UU No. 24/2003 dan PMK 06/PMK/2005. Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa ketentuan ambang batas dalam Pasal 222 UU No. 7/2017 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena melanggar prinsip moralitas, rasionalitas, keadilan, dan hak konstusional warga negara. Penghapusan aturan tersebut diharapkan dapat mengembalikan hak konstusional partai politik untuk mengusulkan calon secara setara, meningkatkan pluralitas kandidat, serta menciptakan sistem pemilu yang lebih responsif, inklusif, dan sejalan dengan prinsip demokrasi serta kedaulatan rakyat. 2. Mahkamah Konstitusi memainkan peran kunci dalam mengawasi dan memutuskan penghapusan presidential threshold, yang secara signifikan

memperluas demokrasi dan meningkatkan representasi politik di Indonesia. Dengan mekanisme judicial review yang diaplikasikan secara tepat, MK berhasil menghilangkan batasan diskriminatif yang sebelumnya membatasi partisipasi partai-partai kecil dan calon independen dalam pencalonan presiden, sehingga membuka ruang bagi keberagaman aspirasi politik masyarakat. Keputusan MK ini tidak hanya memperkuat prinsip kedaulatan rakyat dan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih, tetapi juga mendorong terbentuknya koalisi politik yang lebih inklusif dan representatif, yang pada akhirnya berpotensi menghasilkan pemerintahan yang lebih stabil, efektif, dan responsif terhadap dinamika sosial serta tuntutan demokrasi modern.

**FARNA, NUZULLUDDIN. 2025. IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PEMILU PRESIDEN. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas konstitusionalitas dan implikasi penghapusan presidential threshold dalam UU No. 7/2017 yang mewajibkan partai politik atau gabungan partai politik memiliki minimal 20 % kursi DPR atau 25 % suara sah nasional untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, mengakibatkan dominasi partai besar, hambatan bagi partai kecil, fragmentasi politik, dan polarisasi masyarakat. Metode yuridis normatif digunakan dengan pendekatan perundang-undangan untuk menelaah UU No. 7/2017, UUD 1945, serta putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa presidential threshold, meski awalnya dimaksudkan untuk menyederhanakan multipartai dan memperkuat sistem presidensial, kini tidak relevan dalam konteks pemilu serentak dan mengurangi pluralitas kandidat. Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 menegaskan Pasal 222 UU No. 7/2017 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena melanggar prinsip moralitas, rasionalitas, keadilan, serta hak konstitusional warga negara. Mahkamah Konstitusi melalui judicial review berhasil menghapus ambang batas tersebut, memperluas akses partai kecil dan calon independen, serta mendorong pembentukan koalisi politik yang lebih inklusif dan representatif. Reformasi ini diharapkan meningkatkan kualitas demokrasi, representasi politik, dan kedaulatan rakyat di Indonesia.

**Kata Kunci :** presidential threshold; Mahkamah Konstitusi; judicial review; demokrasi

**FARNA, NUZULLUDDIN. 2025. LEGAL IMPLICATIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT'S DECISION ON THE ELIMINATION OF PRESIDENTIAL THRESHOLD IN PRESIDENTIAL ELECTIONS. Master Of Law Program, Faculty Of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor: Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

### **ABSTRACT**

*This study examines the constitutionality and legal implications of abolishing the presidential threshold stipulated in Law No. 7/2017, which requires political parties or coalitions to hold at least 20 % of DPR seats or 25 % of the national valid vote to nominate presidential candidates. This requirement conflicts with Article 6A paragraph (2) of the 1945 Constitution, leading to big-party dominance, barriers for small parties, political fragmentation, and societal polarization. A normative juridical method with a statutory approach is employed to analyze Law No. 7/2017, the 1945 Constitution, and Constitutional Court Decision No. 62/PUU-XXII/2024. Findings reveal that while the presidential threshold was originally intended to streamline multiparty competition and strengthen the presidential system, it has become irrelevant in the context of simultaneous elections and reduces candidate plurality. Decision No. 62/PUU-XXII/2024 declared Article 222 of Law No. 7/2017 void for violating principles of morality, rationality, justice, and citizens' constitutional rights. Through judicial review, the Constitutional Court eliminated this discriminatory barrier, expanded access for small parties and independent candidates, and fostered more inclusive, representative political coalitions. This reform is expected to enhance democratic quality, political representation, and popular sovereignty in Indonesia.*

**Keywords:** *presidential threshold; Constitutional Court; judicial review; democracy*

## UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji bagi Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul “**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PEMILU PRESIDEN**”, sebagai tugas akhir dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Pascasarjana Magister pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Selanjutnya dengan seluruh kerendahan hati terhatur segala penghargaan dan salam terima kasih yang sangat tulus kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan selama ini:

1. Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus pembimbing Tesis.
2. Bapak **Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H.**, selaku Koordinator Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Bapak dan Ibu Dosen, selaku penguji yang telah memberikan masukan, saran dan koreksi atas penulisan tesis ini
4. Seluruh Dosen Pengasuh mata kuliah Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
5. Segenap Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Keuangan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
6. Keluarga tercinta yang selalu mendoakan.
7. Rekan-rekan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam kelancaran penulisan tesis ini.

Banjarmasin, Juli 2025

Hormat Penulis,

Nuzulluddin Farna

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
MOTTO/ PERSEMBAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
UCAPAN TERIMAKASIH	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Keaslian Peneliti.....	14
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
E. Tinjauan Pustaka .....	17
F. Metode Penelitian.....	57
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan .....	66
BAB II RASIOLOGIS DALAM PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL THRESHOLD OLEH MAHKAMAH KONSITUSI.....	67
A. Rasionalitas Konstitusional dalam Sistem Demokrasi .....	67
B. Rasionalitas Politik: Mendorong Demokrasi yang Inklusif dan Kompetitif.....	74
C. Rasionalitas Hukum dan Prinsip Persamaan Hak Politik.....	79
BAB III IMPLIKASI HUKUM TERKAIT PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PEMILU PRESIDEN .	86
A. Implikasi terhadap Sistem Ketatanegaraan .....	86
B. Implikasi terhadap Sistem Hukum Pemilu .....	91
C. Implikasi terhadap Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara.....	96
BAB IV PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 3.1 Perbandingan negara dalam sistem pemerintahan.....	102